



## Pemkot Yogya Gelontorkan Rp32 M untuk BPJS PBI

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota Yogyakarta siapkan anggaran sebesar Rp32 miliar untuk meng-cover kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Jika anggaran tersebut kurang, DPRD siap memberikan tambahan pada APBD perubahan.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Solihul Hadi mengatakan, penambahan anggaran untuk BPJS PBI pada APBD Perubahan masih sangat memungkinkan. "Sangat memungkinkan kalau sampai ngejar ning nggon

anggaran perubahan," ujarnya, Selasa (10/2).

Solihul menegaskan, bahwa anggaran untuk kebutuhan mendasar tidak bisa ditunda dan tidak bisa ditolak. "Sangat mungkin karena memang kami khususnya kayak di komisi D itu saya sendiri selalu menyampaikan bahwa kebutuhan mendasar itu nggak bisa ditolak-tolak," katanya.

Ia juga mempertanyakan keputusan pemerintah pusat dalam menonaktifkan BPJS PBI yang dibiayai oleh APBN. Padahal, bantuan ini digunakan oleh masyarakat kurang mampu

untuk berobat.

"Bukan daerah tidak mau membantu, bukan. Tapi rasionalisasinya apa begitu? Sehingga kemudian daerah dibebankan masalah PBI oleh pusat itu. Ini faktor apa? Maksud saya apa negara itu defisit, atau negara itu mau kolaps, atau negara itu shutdown kan begitu," ungkapnya.

"Kalau kita lihat dari struktur anggaran baik-baik saja kan begitu. Alokasi anggaran

● ke halaman 11

### Pemkot Yogya

● Sambungan Hal 1

dari kementerian keuangan ke kementerian sosial juga nominalnya sama, tidak ada yang dikurangi. Kenapa harus ada pemangkasan PBI secara massal seperti itu?" imbuhnya.

Menurut dia, penonaktifan BPJS PBI secara mendadak dapat berdampak pada kesehatan seseorang. "Ini urusannya nyawa. Beda kalau mungkin kegiatan misalnya ini mau membangun apa, tower atau mau membangun bendungan, mau membangun apa, di-endeg

(diberhentikan) itu tidak masalah tidak ada ruginya," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Waryono mengatakan, anggaran untuk memenuhi kebutuhan BPJS PBI saat ini masih sekitar Rp32 miliar. Anggaran tersebut, kata dia, bersumber dari APBD Induk.

"APBD kota murni, anggaran di tahun ini kita masih berkisar di angka Rp32 miliar untuk jamkesnya," ujar Waryono.

Waryono menjelaskan, pembayaran BPJS PBI dari Pemkot Yogyakarta dilaku-

kan untuk periode 12 bulan. Namun, pada tahun ini akan dilakukan peninjauan ulang bersama BPJS Kesehatan.

"Akan kita tinjau ulang pada bulan 9. Kita berusaha untuk cukup-cukupkan dulu, kalau ada kekurangan ya nanti di perubahan (usulan)," kata dia.

Selain untuk jaminan kesehatan, anggaran Rp32 miliar tersebut juga digunakan untuk membiayai layanan kesehatan bagi masyarakat telantar. "Jadi Rp1,5 miliar untuk pelayanan PSC 1x24 jam lalu orang-orang yang kena masalah sosial, termasuk korban KDRT," beber Waryono. **(aka/lpc)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

